



# Cegah Terjadi Sengketa Lahan

## ■ BPN Gemakan GEMAPATAS 1 Juta Patok

**LANDAK, TRIBUN** - BPN Kabupaten Landak ajak masyarakat ikuti gerakan pemasangan tanda batas (GEMAPATAS) 1 juta patok serentak pada 3 Februari 2023 di mana Kabupaten Landak ada empat titik pelaksanaan.



**KETERANGAN** - Kepala Kantor BPN Kabupaten Landak Saumurdin ditemui di Kantor BPN Kabupaten Landak, Rabu (25/1/23).

Kepala Kantor BPN Landak Saumurdin, mengatakan pemasangan tanda batas secara serentak se-Indonesia itu rencana akan dicatatkan dalam rekor MURI. Di mana dasar kegiatan karena banyak terjadi sengketa tanah akibat tidak adanya tanda batas tanah.

Hal itu juga menyulitkan pihak BPN dalam proses pengukuran tanah untuk menerbitkan sertifikat, khususnya dalam program PTSL. Dimana program PTSL di Kabupaten Landak tahun 2023 memiliki target untuk 3000 hektare lahan.

"Ada beberapa hambatan untuk pelaksanaan PTSL. Seperti masalah rintis lokasi tanah, saat pengukuran biasanya belum dipasang patok tanah. Maka oleh kementerian digemakan supaya tanah masyarakat harus dipasang patok

batas untuk memperlancar proses pengukuran, menghindari sengketa batas, masalah sebelum pengukuran," kata Saumurdin, Rabu (25/1/23).

Saumurdin mengatakan selama ini masih banyak yang beranggapan bahwa yang berwenang membuat tanda batas adalah pihak BPN. Namun hal itu sejatinya keliru, karena yang seharusnya memasang patok batas tanah adalah pemilik tanah dan yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut.

Adapun dalam program GEMAPATAS, khusus Kabupaten Landak dilaksanakan di 4 titik yakni Desa Bagak Kecamatan Menyuke, Desa Paku Raya Kecamatan Kuala Behe, Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila, Desa Keranji Mancal Kecamatan Sengah Temila.

Dikatakan Saumurdin,

patok batas sangat penting karena banyak sekali permasalahan yang muncul akibat tidak adanya tanda batas atau patok batas. Permasalahan itu biasanya sengketa tanah, saling serobot, merubah patok batas dan lainnya yang terjadi tidak hanya di tanah pribadi tetapi juga terhadap tanah negara.

Sementara itu, Kartono selaku Kepala Desa Paku Raya, Kecamatan Kuala Behe, menyambut baik kegiatan tersebut. Mengingat patok batas menunjukkan batas hak kepemilikan seseorang terhadap lahan atau tanah.

"Kami bersyukur di desa kami mendapatkan kuota dari program PTSL dari BPN Kabupaten Landak. Karena tidak semua dapat kesempatan ini yang diawali dengan program GEMAPATAS. Kalau di desa kami sementara untuk masyarakat yang punya sertifikat masih sedikit dan harapannya tidak ada lagi nanti sengketa lahan," pungkasnya. **(lan)**